

Hari/tanggal : 6 Maret 2023

Waktu : 13.00 WITA – Selesai

Tempat : Ruang Departemen Ilmu  
Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya,  
Universitas Hasanuddin

**ORGANISASI PAGAR DESA (OPD) DI BANTAENG PADA TAHUN  
1955-1960**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya**

**Universitas Hasanuddin**

**Oleh**

**NIRWANA**

**Nomor Pokok: F061181006**

**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**



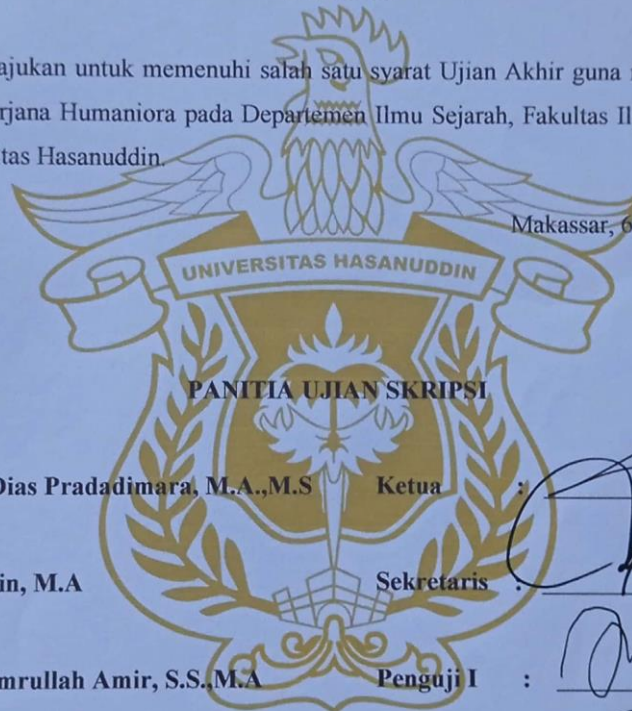
**HALAMAN PENERIMAAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Senin, 6 Maret 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**ORGANISASI PAGAR DESA (OPD) DI BANTAENG PADA TAHUN  
1955-1960**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Maret 2023



- |                                    |              |   |  |
|------------------------------------|--------------|---|--|
| 1. Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S | Ketua        | : |  |
| 2. Nasihin, M.A                    | Sekretaris   | : |  |
| 3. Dr. Amrullah Amir, S.S.,M.A     | Penguji I    | : |  |
| 4. Andi Lili Evita, S.S.,M.Hum     | Penguji II   | : |  |
| 5. Drs. Dias Pradadimara, M.A      | Konsultan I  | : |  |
| 6. Nasihin, M.A                    | Konsultan II | : |  |

## PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nirwana

NIM : F061181006

Departemen/Program Studi : Ilmu Sejarah/Strata Satu (SI)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang berjudul

### **ORGANISASI PAGAR DESA (OPD) DI BANTAENG PADA TAHUN 1955-1960**

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Kepenulisan ini sesuai dengan kaidah kepenulisan akademik, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat didalamnya unsur-unsur plagiarisme dan dapat dibuktikan metode historiografinya, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 13 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Nirwana

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas seluruh rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng Pada Tahun 1955-1960” sebagai salah satu syarat menyanggah gelar Sarjana. Shalawat dan salam senantiasa terurahkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wa salam, nabi dan rasul penutup yang senantiasa menyebarkan tauhid dan kebaikan serta membawa ajaran islam sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia seluruh alam.

iDibalik perjalanan penyusunan skripsi ini, terdapat peran besar dan partisipasi dari banyak pihak yang membantu dan menunjang penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak **Irwan**, dan Ibu **Niswati**, yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Memberi dukungan moril dan materil, serta panjatan doa-doa terbaik. Terima kasih karena kalian selalu mendukung dan memberikan ku semangat, rela berkorban demi kebahagiaan ku dan adik-adik. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian.
2. Adik penulis, **Teguh** dan **Fatir** yang telah mendukung dan menjadi salah satu alasan penulis untuk terus maju dan memberikan yang terbaik.
3. Segenap keluarga penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan doa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini.



4. Kedua pembimbing penulis, Bapak **Drs. Dias Pradadimara, M. A., M.S**, dan Bapak **Nasihin, M.A** yang senantiasa membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, memotivasi, dan mendorong peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Bapak **Dr. Ilham, M.Hum**, Serta dosen-dosen Ilmu Sejarah **Dr. Muh. Bahar Akkasse, Teng., Lcp., M. Hum**, selaku Penasehat Akademik penulis. **Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum, A. Lili Evita, S.S., M. Hum, Dr. Nahdia Nur, M. Hum, Dr. Amrullah Amir, S.S., MA., Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum, Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag, Dr. Bambang Sulisty., M. Hum, Alm. Prof. Dr. Rasyid Asba, M.A**, dan mendiam ibu **Magriet Moka Lappia, S.S., M.S**. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama kuliah.
6. Sahabat terbaikku dari masa kanak-kanak sampai perkuliahan **Fitrah**, terima kasih sudah menemaniku dalam suka maupun duka. Menyediakan pundak saat aku menangis dan memberikan bantuan saat aku membutuhkannya.
7. Sahabat-sahabatku yang tersayang almarhumah **Itti, Dani, Andra, Nain, Piya, Sarip**, almarhum **Asar**, dan almarhum **Dedi** yang telah banyak membantu selama ini, menjadi tempat berkeluh kesah selama di Makassar. terima kasih selalu ada untuk ku.
8. Teman-teman Ilmu Sejarah 2018, **Risma, Nurul, Alda, Irma, Widya, Yuni, Fika, Ulfa, Fira, Salsa, Fajrul, Dinal, Jaya, Yudi, Usman, Arfani**,

**Gaffur, Reza, Reyhan, Hasbi, Darwan, Tristan dan Hendra.** Terima kasih atas semua kisah dan kebersamaannya selama masa perkuliahan.

9. Tanteuku tersayang dan tercinta, tante **Fitri** dan tante **Nirma** adik dari Bapak dan mama yang sudah seperti kakak perempuanku. Makasih banyak untuk kalian berdua karena selalu mendukungku.
10. Sahabat sepejuangan di SMAN 2 Bulukumba, **Itti, Desi, Elis,** dan **Mintang.** Terima kasih karena kalian selalu meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesahku.
11. Teman-teman KKN Bulukumba 4 gelombang 106, **Dija, Ampe, Uppa, Uci, Ani, Ifa, Niyo, Fitri, Ima Rasyid, Ima Bahnur, Pute, Qila, Mus, Cidong, Dini, Nisa, Anggi, Fika, Adel, Aryun, Ila, Sandi** dan **Kak Coyu** yang telah memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Makassar, 07 Februari 2023

Nirwana

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
HALAMAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ISTILAH .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian .....	7
1.5 Tinjauan pustaka.....	8
1.6 Metode penelitian .....	10
1.7 Sistematika penulisan .....	13
BAB II GAMBARAN UMUM BANTAENG TAHUN 1950-1955 .....	15
2.1 Kondisi Geografis dan Kondisi Kependudukan .....	15
2.2 Kondisi Keamanan di Bantaeng Tahun 1950-1952.....	18



2.3	Aktivitas DI/TII di Bantaeng Tahun 1953-1955 .....	27
BAB III PEMBENTUKAN OPD .....		32
3.1	Nasution sebagai penggagas OPD.....	32
3.2	Latar belakang Terbentuknya OPD di Sulawesi Selatan.....	36
3.3	Pembentukan OPD di Bantaeng .....	40
3.4	Prosedur OPD .....	49
3.4.1	Organisasi .....	50
3.4.2	Keanggotaan .....	51
3.4.3	Tugas .....	51
3.4.4	Hak .....	51
3.4.5	Kewajiban.....	52
3.4.6	Perlengkapan .....	53
3.4.7	Keuangan.....	54
BAB IV AKTIVITAS OPD DI BANTAENG.....		58
4.1	Operasional OPD di Bantaeng 1955-1960.....	58
4.2	Dampak dibentuknya OPD di Bantaeng 1955-1960.....	64
BAB V KESIMPULAN.....		69
5.1	Kesimpulan.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN.....		75

## **DAFTAR ISTILAH**

Afdeeling	:	Sebuah wilayah administratif pada masa pemerintah kolonial Belanda, yang setingkat dengan Kabupaten.
Batalion	:	kesatuan militer yang terdiri dari dua sampai empat kompi. Dengan jumlah pasukan 300-1000 orang.
Brigade	:	Satuan angkatan bersenjata yang terdiri atas dua, tiga, atau empat resimen.
Divisi	:	Satuan militer yang jumlahnya besar yang biasanya lengkap dengan peralatannya, dipimpin oleh perwira tinggi.
Gerombolan	:	Kawanan pengacau, perusuh dan sebagainya.
Onderafdeeling	:	Sebuah wilayah administratif pada masa kolonial Hindia Belanda, yang setingkat dengan kewedanan.
Resimen	:	Pasukan Tentara yang terdiri atas beberapa batalion yang biasanya dikepalai oleh seorang perwira menengah.
Territorium	:	Wilayah Militer.

## **DAFTAR SINGKATAN**

APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
Bn	: Batalion
CP	: Command Post (Pos Komando)
CTN	: Corps Tjadangan Nasional
DI	: Darul Islam
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
KDM	: Komando (Komandan) Distrik Militer
KODM	: Komando (Komandan) Onder distrik Militer
KMD	: Komando (Komandan) Militer Daerah
KGSS	: Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
MBKD	: Markas Besar Komando Jawa
MBR	: Mobile Brigade Ratulangi
NII	: Negara Islam Indonesia
OPD	: Organisasi Pagar Desa
RI	: Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TII	: Tentara Islam Indonesia
TT	: Territorium

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Jumlah penduduk Bantaeng tahun 1952-1955 .....	17
Tabel 3.1 Nama-nama anggota OPD Bantaeng pada tahun 1955 .....	42
Tabel 3.2 Perincian biaya untuk pelatihan kader anggota OPD Bantaeng .....	47
Tabel 4.1 Daftar nama anggota OPD Bantaeng yang tewas pada maret 1957 .....	62

## ABSTRAK

**Nirwana, Nomor Induk Mahasiswa F061181006, dengan Judul “Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng Pada Tahun 1955-1960”, dibimbing oleh Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S dan Nasihin, MA.**

Penelitian ini secara umum menjelaskan perkembangan Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng pada tahun 1950-1960. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang terbentuknya OPD di Bantaeng, aktivitas OPD di Bantaeng, serta dampak dari dibentuknya OPD di Bantaeng. Karya ini disusun dengan menggunakan sumber primer berupa arsip-arsip mengenai OPD, dan data wawancara. Selain itu juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal dan artikel.

Menyebarkan luasnya kekacauan-kekacauan di Bantaeng pada tahun 1950-an membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekacauan salah satunya adalah membentuk organisasi yang bertujuan untuk memulihkan keamanan, seperti Organisasi Pagar Desa (OPD). Organisasi ini dibentuk pada tahun 1955 sebagai alat negara yang turut serta membantu tugas-tugas umum angkatan perang setempat, sebagai pertahanan dan perlawanan daerah dalam menghadapi aksi-aksi teror serta menjaga keamanan daerah. Setelah terbentuknya OPD di Bantaeng dan di resmikan di beberapa kampung-kampung, kemudian OPD ini mulai ikut aktif membantu angkatan perang dalam melakukan pengamanan. Dalam menjalankan tugasnya anggota OPD yang telah dibagi dalam regu melakukan patroli bersama dengan anggota TNI, mereka melakukan ronda setiap malam, dan keliling kampung. Dalam perkembangannya berbagai upaya-upaya yang dilakukan OPD lambat laun membuahkan hasil. Kondisi keamanan serta perekonomian masyarakat mulai membaik.

**Kata Kunci: OPD, Bantaeng, Keamanan.**

## **ABSTRACT**

**Nirwana, Main Number F061181006, with the title "Village Fence Organization (OPD) in Bantaeng in 1955-1960", guided by Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S and Nasihin, MA.**

This study generally describes the development of the Village Fence Organization (OPD) in Bantaeng in 1950-1960. This study aims to find out the background of the formation of the OPD in Bantaeng, the activities of the OPD in Bantaeng, and the impact of the formation of the OPD in Bantaeng. This work was compiled using primary sources in the form of archives regarding OPD, and interview data. It also uses secondary sources in the form of books, journals and articles.

The spread of chaos in Bantaeng in the 1950s made the government make various efforts to deal with the chaos, one of which was to form an organization aimed at restoring security, such as the Village Fence Organization (OPD). This organization was formed in 1955 as a tool of the state that participates in assisting the general tasks of the local armed forces, as regional defense and resistance in dealing with acts of terror and maintaining regional security. After the OPD was formed in Bantaeng and inaugurated in several villages, this OPD began to actively assist the armed forces in carrying out security. In carrying out their duties, OPD members who have been divided into teams carry out joint patrols with TNI members, they carry out patrols every night, and go around the village. In its development, the various efforts made by OPD have gradually yielded results. The security and economic conditions of the people began to improve.

**Keywords: OPD, Bantaeng, Security.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia pada tahun 1950-an dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, seperti masalah ekonomi, sosial, hubungan luar negeri maupun masalah pertahanan keamanan. Masalah keamanan, merupakan masalah yang sangat kompleks terjadi di daerah-daerah. Masalah ini bersumber dari kekacauan yang terjadi di pusat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia pada saat itu merupakan negara yang baru merdeka.

Di beberapa daerah di Indonesia terjadi kekacauan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri. Salah satunya di Sulawesi Selatan yaitu munculnya gerakan DI/TII, yang dipelopori oleh Kahar Muzakkar.<sup>1</sup> Gerakan ini awalnya hanya ada di Jawa. Akan tetapi kemudian Kahar menggabungkan diri kedalam gerakan ini. Gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Indonesia) adalah gerakan yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 agustus 1949,<sup>2</sup> dengan pasukannya yang diberi nama Tentara Islam Indonesia

---

<sup>1</sup> Dalam tulisan ini penulis menggunakan huruf (K) pada awal kata Kahar Muzakkar. Penulisan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan penulisan yang berbeda terhadap nama tersebut. Anhar Gonggong umumnya menggunakan awalan (Q) untuk menyebut nama Qahar Muzakkar, sedangkan Harvey umumnya menggunakan huruf (K) untuk menyebut Kahar Muzakkar.

<sup>2</sup> C. Van Dijk. *Darul Islam: Sebuah Pemberontak*. Jakarta: Grafiti, 1993, hal. 83.



(TII). Darul Islam merupakan respon S.M. Kartosuwiryo karena menganggap bahwa pemerintah menyerahkan dan meninggalkan wilayah Jawa Barat kepada Belanda.<sup>3</sup> Munculnya gerakan DI/TII di wilayah Jawa Barat inilah yang akhirnya memicu daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama seperti Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi.

Di Sulawesi Selatan pergerakan DI/TII dimulai Setelah Kahar Muzakkar menyatakan diri untuk bergabung dengan operasi gerakan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953<sup>4</sup>. Sebelum masuknya Kahar dalam gerakan DI/TII kondisi Keamanan di Sulawesi Selatan setelah kemerdekaan Indonesia memang sudah tidak terjamin hal ini disebabkan oleh permasalahan gerilya, permasalahan ini bermula setelah diadakannya Rera (Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang) yang dilakukan pada tahun 1947 menyebabkan banyaknya anggota gerilya yang kemudian merasa kecewa karena banyak dari mereka yang tidak dimasukkan dalam APRI. Para gerilya menginginkan agar penerimaan mereka ke dalam APRI (TNI) dilakukan secara utuh atau keseluruhan tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu. Akan tetapi keinginan ini ditolak oleh pemerintah yang mana menginginkan sistem penerimaan perbatalion, bukan secara utuh atau menyeluruh seperti apa yang dikehendaki oleh para gerilya. Akibat dari perselisihan ini lah yang akhirnya menjadi salah satu pemicu atau

---

<sup>3</sup> M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi, 2001, hal. 457.

<sup>4</sup> Anhar Gonggong. *Abdul Kahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004, hal. 21.

penyebab lahirnya kemelut dan gerakan separatisme di Sulawesi Selatan.<sup>5</sup> Karena merasa kecewa akhirnya banyak dari kelaskaran-kelaskaran atau para gerilyawan yang kemudian melarikan diri ke hutan, dan kemudian melakukan kekacauan. Menyebarluasnya kekacauan-kekacauan di tahun 1950-an kemudian membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekacauan seperti melakukan berbagai operasi-operasi militer serta membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memulihkan keamanan, salah satunya yaitu dengan membentuk Organisasi Pagar Desa (OPD). Organisasi ini dibentuk sebagai alat negara yang turut serta membantu tugas-tugas umum angkatan perang setempat, sebagai pertahanan dan perlawanan daerah dalam menghadapi aksi-aksi teror serta menjaga keamanan daerah.

Berbicara tentang pertahanan dan perlawanan di dalam negeri terutama di suatu daerah tertentu seringkali kita berpendapat bahwa yang terlibat di dalamnya secara keseluruhan dalam menumpas pemberontakan adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia dan pihak kepolisian. Namun dalam tulisan ini, penulis mencoba mengambil dari sudut pandang yang berbeda, keluar dari apa yang selama ini dipahami dari sebagian orang bahwa, ketika berbicara tentang masalah perlawanan di suatu daerah atau wilayah tertentu yang berperang secara keseluruhan adalah para alat-alat negara saja, seperti Tentara Nasional Indonesia dan pihak Kepolisian. Perlawanan yang akan penulis bahas nantinya adalah

---

<sup>5</sup> Bahtiar dkk. *Dinamika Kemiliteran : Dari Kelaskaran Hingga Batalyon 710 Di Sulawesi Selatan*. Makassar : Unhas Press, 2019, hal. 130.

Perlawanan yang sebagian melibatkan masyarakat sipil dengan sukarelawan. Tentunya dengan adanya suatu instruksi langsung dari Pemerintah.

Organisasi Pagar Desa (OPD) merupakan salah satu organisasi yang dihimpun dari masyarakat sipil yang dibentuk pada 19 Maret 1955, berdasarkan keputusan bersama no. 319/VI/55 antara Gubernur Lanto Daeng Pasawang sebagai kepala daerah Sulawesi Selatan dan panglima Ter.VII/WIRABUANA Kolonel Warouw sebagai bagian pemulihan keamanan.<sup>6</sup> Organisasi pagar desa itu sendiri ditempatkan di tiap-tiap desa atau distrik. Adapun berbagai tugas dari OPD yaitu, menyelidiki gerak gerik musuh/gerombolan pengacau, mengadakan anti sabotase, dan melakukan perlawanan anti gerilya serta dapat menggerakkan massa dengan menggunakan potensi agar masyarakat ikut serta di dalam pertahanan menghadapi ancaman yang ada.

Organisasi Pagar Desa tidak hanya di bentuk di Makassar, tetapi juga di bentuk di berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk Bone, Bantaeng, Luwu, Pare-pare dan beberapa daerah lain yang aktif dalam kegiatan menumpas gerombolan. Bantaeng adalah suatu daerah afdeeling yang secara administratif mewilayahi empat onderafdeeling atau kewedanan yaitu Sinjai, Bulukumba, Selayar dan *onderafdeeling* Bonthain (Bantaeng) itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Pemerintah Daerah Maros 1943-1957 Vol. I. No. Reg. 65. Membahas Tentang Prosedur Organisasi Pagar Desa (OPD).*

Dari beberapa laporan tahunan di tahun 1950-an Bantaeng merupakan salah satu daerah yang banyak terjadi kekacauan yang disebabkan oleh gerombolan. Apalagi setelah tuntutan-tuntutan para gerilya tidak dipenuhi dan mereka memilih untuk mengundurkan diri ke hutan. Di daerah Bantaeng sendiri tepatnya 15 Juni 1950 seluruh gerilya (KGSS dan MBR) yang ada di Bantaeng meninggalkan tempatnya masing-masing dan kemudian memilih untuk mengundurkan diri ke hutan dan daerah pegunungan yang ada di Bantaeng.<sup>7</sup> Para gerilya ini kemudian melakukan kekacauan-kekacauan ditambah lagi setelah Kahar menggabungkan dirinya dengan gerakan DI/TII di tahun 1953, yang kemudian di berbagai daerah dibentuk berbagai distrik-distrik militer yang dikepalai oleh setiap Komandan Brigade. Diantaranya Brigade Latimojong dengan wilayah operasi Pare-pare dan Enrekang, Brigade Batu Putih wilayah operasi Palopo dan Siwa , Brigade Lereng Cinta wilayah operasi Soppeng, Brigade Rante Mario wilayah operasi Enrekang yang terakhir Brigade 4.000 wilayah operasi Wajo. Dalam perkembangannya Brigade Lereng Cinta yang wilayah operasinya Soppeng kemudian menyebarluaskan operasinya ke wilayah Bantaeng yang mana kemudian dibentuk pasukan dengan nama CP III yang dipimpin oleh Ali A.T.<sup>8</sup> pasukan CP III banyak berkeliaran di daerah

---

<sup>7</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Regeing van Oost Indonesie (Pemerintah Indonesia Timur) tahun 1946-1950*. No. Reg. 104. Membahas tentang warta politik Celebes Selatan.

<sup>8</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960, Vol. I No. Reg. 333*. Mengenai Gerombolan DI/TII di Sulawesi Selatan.

pegunungan. Yang kemudian juga banyak melakukan kekacauan-kekacauan di berbagai daerah-daerah yang ada di Bantaeng. karena kekacauan semakin bertambah akhirnya dibentuklah Organisasi Pagar Desa di Bantaeng guna untuk membantu angkatan perang dalam menghadapi para gerombolan.

Pada dasarnya Organisasi Pagar Desa yang dibentuk dengan melibatkan masyarakat sipil mereka juga dibekali senjata api seperti dengan Tentara Nasional Indonesia, namun tentunya yang membedakannya adalah dalam hal pendidikan, pelatihan, dan organisasi. Keterlibatan masyarakat sipil yang turut andil secara sukarelawan ini kemudian menarik minat saya membahas tentang Organisasi Pagar Desa di Bantaeng tahun 1955-1960. Juga yang menarik adalah pemerintah membentuk sebuah perlawanan sipil yang melibatkan rakyat untuk melawan rakyat itu sendiri padahal untuk mengatasi keamanan yang terjadi ini merupakan tugas dan tanggung jawab TNI dan pihak kepolisian.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka dianggap perlu untuk memberikan batasan masalah agar berfokus pada penelitian dan tidak melebar dari segi waktu dan tempat. Pada penulisan skripsi ini batasan masalah terbagi atas dua, yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal, dimulai pada tahun 1955, dikarenakan pada tahun tersebut Organisasi Pagar Desa di kabupaten Bantaeng mulai dibentuk, kemudian sampai pada tahun 1960 yaitu kekacauan di Bantaeng berkurang dan beberapa anggota DI/TII menyerahkan diri kepada

---

pemerintah, serta dibubarkannya OPD di Bantaeng. Sedangkan batasan spasial, penulis memfokuskan untuk memilih lokasi di Kabupaten Bantaeng.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Setelah melihat beberapa hal yang telah dikemukakan diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya organisasi Pagar Desa di Bantaeng?
2. Bagaimana aktivitas dan dampak yang ditimbulkan dari dibentuknya Organisasi Pagar Desa di Bantaeng pada tahun 1955-1960?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian merupakan rumusan yang menunjukkan hasil, dimana hasil yang diperoleh setelah penelitian selesai yang menjelaskan gambaran secara umum objek yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a) Tujuan Penelitian ini yaitu:
  1. Untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya Organisasi Pagar Desa di Bantaeng.
  2. Untuk mengetahui aktivitas dan dampak yang ditimbulkan dari dibentuknya Organisasi Pagar Desa di Bantaeng pada tahun 1955-1960.
- b) Manfaat dari penelitian ini yaitu:
  1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana strata satu di jurusan ilmu sejarah Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Menambah catatan sejarah pemerintah untuk wilayah Bantaeng serta dapat dijadikan bahan acuan para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji persoalan yang sama.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang **Organisasi Pagar Desa (OPD) di Bantaeng Tahun 1955-1960**, dalam penyusunannya memerlukan berbagai sumber dan untuk mendapatkan bukti-bukti yang khusus mengenai Organisasi Pagar Desa di Bantaeng, penulis menggunakan beberapa dokumen dan arsip yang diperoleh dari Dinas Arsip Perpustakaan dan Kedaerahan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu untuk melengkapi tulisan ini penulis juga menggunakan berbagai buku.

Harvey Barbara Sillars, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Dalam buku ini memberikan gambaran umum tentang Sulawesi Selatan di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan pada saat pendudukan Jepang. Penjelasan-penjelasan tentang apa yang terjadi pada masa Revolusi, peristiwa kemerdekaan dan munculnya pemberontakan, Darul Islam di hutan, sampai gambaran—gambaran akhir pemberontakan. Dalam buku ini Barbara juga banyak menjelaskan mengenai dinamika militer khususnya di Sulawesi Selatan, tidak sampai disitu dijelaskan juga mengenai kondisi keamanan dan politik Sulawesi Selatan. Di buku ini dijelaskan bahwa pada tahun 1950-an sebagian besar yang dihadapi di Sulawesi Selatan adalah masalah pemberontakan, khususnya pemberontakan DI/TII. Masalah ini muncul karena diawali dengan tidak diberikannya status resmi orang-orang yang berjuang pada masa revolusi atau para



gerilyawan sebagai Tentara Nasional. Pemberontakan yang dilakukan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah sangat lemah.

Anhar Gonggong, *Abdul Kahar Muzakkar dari Patriot Hingga Pemberontak*. Dalam buku ini membahas tentang awal terjadinya pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar, yang mana pemberontakan ini membawa keresahan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam buku ini dijelaskan mengenai Kahar Muzakkar yang terkenal sebagai patriot, proses terjadinya pemberontakan, hingga tewasnya Kahar Muzakkar yang disebabkan oleh aksi militer yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan juga dijelaskan bahwa pemberontakan yang terjadi di Sulawesi pada saat itu disebabkan bukan hanya karena kekecewaan akan tetapi adanya budaya *Siri'-Passe* yang ada dalam masyarakat Bugis-Makassar.

C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontak*. Pada buku ini terdapat beberapa penjelasan mengenai Indonesia pasca kemerdekaan, yang mana bangsa ini dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, seperti masalah ekonomi, sosial, politik, serta masalah pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan muncul berbagai gerakan perlawanan terhadap pemerintah, seperti Gerakan Darul Islam yang dipelopori oleh S.M. Kartosoewirjo di Jawa Barat yang akhirnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke daerah Sulawesi Selatan.

A. H. Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya Taktik dan pertahanan Republik Indonesia di masa lalu dan yang akan datang*. Pada buku ini membahas tentang pokok-pokok taktik perang dalam penumpasan penjajah di Indonesia dan taktik

perang itulah yang diwariskan kepada prajurit-prajurit tempur untuk mewujudkan keamanan dan juga ketertiban. Dalam buku ini Nasution juga menjelaskan bagaimana seharusnya perang gerilya dilakukan dan aspek-aspek apa yang seharusnya mendapat perhatian penting dalam melakukan perang gerilya. Dimana dalam bukunya Nasution menjelaskan bahwa perang tidak hanya didominasi oleh ilmu perang seperti yang berkaitan dengan strategis, taktik, dan logistiknya saja tetapi juga melibatkan berbagai aspek diantaranya politik, psikologis, dan sosial ekonomi. Dalam buku inilah kemudian Nasution menjelaskan bagaimana akhirnya OPD dibentuk dan muncul sebagai salah satu organisasi yang bertujuan untuk membantu angkatan perang, pembentukan OPD ini merupakan salah satu taktik Yang digunakan Nasution dalam Perang Rakyat Semesta.

Ulf Sundhaussen, Politik militer Indonesia 1945-1967; menuju dwi fungsi ABRI. Dalam buku ini dibahas tentang proses pembentukan angkatan Perang di Indonesia. Bagaimana hubungan antara sipil dan militer, menjelaskan juga tentang sikap dan peranan militer dalam kehidupan politik Indonesia dari mulai kemerdekaan atau dari awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sampai dengan Orde Baru.

## **1.6 Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan tulisan yang baik maka dibutuhkan sumber dalam suatu penelitian. Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Referensi yang digunakan mulai dari Arsip, buku, Jurnal, Majalah, Wawancara, dan lain-lain. Dalam penulisan ini, pendekatan “deskriptif=analitis” akan digunakan untuk memudahkan penulis dalam

mengungkapkan hubungan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan dimensi-dimensinya.<sup>9</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam metode tersebut meliputi:

1) Pemilihan Topik

Pemilihan topik dilakukan pertama kali untuk menetapkan batasan-batasan yang nantinya hendak diteliti dalam skripsi. Selain itu, pemilihan topik juga dapat dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dengan begitu, hal ini dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan.

2) Pengumpulan Sumber

Dalam pengumpulan sumber digunakan pengumpulan sumber sesuai topik yang ditulis. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan sumber dengan melakukan pengamatan langsung di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sumber primer. Adapun sumber yang penulis dapatkan di kantor arsip yaitu Arsip Bantaeng *nomor reg 315* mengenai Organisasi Pagar Desa (OPD) Kabupaten Bantaeng, Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi 1950-1960 *nomor reg 318* mengenai Organisasi Pagar Desa Arsip Pemerintah provinsi Sulawesi 1950-1960 *nomor reg 331* mengenai gerombolan DI/TII, dan Arsip Pemerintah daerah Maros *nomor reg 65* membahas tentang prosedur Organisasi Pagar Desa.

Penulis juga menggunakan sumber lisan berupa wawancara dengan masyarakat Bantaeng sebagai narasumber dalam kajian penelitian ini, adapun

---

<sup>9</sup> Sartono Kartodirdjo. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gajah Mada Press. 1978, hal. 254.

yang menjadi narasumber dari penelitian ini yaitu Nasiro warga desa Layoa, Mure warga desa Panaikang, Abdul Kadir warga desa Panaikang, dan Beddu warga desa Gantarang Keke Bantaeng, yang pernah menjadi anggota OPD Bantaeng.

Selain itu untuk sumber sekunder penulis mengumpulkan data dari buku-buku, dokumen, karya ilmiah baik itu skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, majalah dan lain-lain yang didapatkan di perpustakaan Universitas Hasanuddin, Fakultas Sastra, Laboratorium Ilmu Sejarah, Perpustakaan Daerah maupun di tempat lain yang berhubungan dengan kajian penulis.

### 3) Kritik Sumber/Verifikasi

Setelah mengumpulkan sumber, tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu kritik sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yaitu menyeleksi keaslian sumber yang di dapat sedangkan kritik intern lebih kepada penyeleksian isi sumber sejarah yang di dapat.

Kritik eksternal dilakukan untuk menguji sumber yang diperoleh asli atau tiruan dan data-data yang didapat belum pernah diubah. Kritik internal untuk menguji kebenaran suatu sumber dengan cara meneliti tulisan untuk mengetahui sumber itu asli, turunan atau palsu.

### 4) Interpretasi/Penafsiran

Setelah melakukan kritik sumber, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah interpretasi (Penafsiran). Pada tahap ini penulis menganalisis fakta-

fakta atau sumber-sumber sejarah yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan mengenai inti dari fakta-fakta sejarah tersebut.

#### 5) Penulisan Sejarah

Tahap yang terakhir adalah penulisan sejarah. Dalam tahap ini data-data dan informasi yang telah di dapat kemudian dirangkai dan dituangkan dalam suatu tulisan sejarah. Dalam penulisan ini penulis diharapkan dapat menyajikan suatu tulisan dengan objektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan yang memiliki lima bab yang akan saling berkaitan. Setiap bab terdiri dari sub bab, yang akan menjelaskan penelitian ini lebih lanjut yang disusun berdasarkan urutan pembahasan seperti di bawah ini:

Bab I, berisi pendahuluan yang terbagi atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum Kabupaten Bantaeng pada tahun 1950-1955 yang meliputi kondisi geografis dan kondisi kependudukan Kabupaten Bantaeng , kondisi keamanan di Bantaeng pada tahun 1950-1953, serta munculnya aktivitas DI/TII di Bantaeng pada tahun 1953-1955.

Bab III, pada bab ini akan membahas tentang pembentukan OPD. Membahas mengenai ide awal pembentukan OPD, latar belakang terbentuknya

Organisasi Pagar Desa (OPD) di Sulawesi Selatan, proses terbentuknya OPD di Bantaeng dan Prosedur dalam OPD.

Bab IV, pada bab ini akan membahas tentang aktivitas OPD di Bantaeng. meliputi Operasional OPD di Bantaeng tahun 1955-1960 serta dampak yang ditimbulkan dari dibentuknya OPD di Bantaeng pada tahun 1955-1960.

Bab V, Kesimpulan, pada bab ini merupakan penjabaran dari bab I sampai bab V yang kemudian akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BANTAENG TAHUN 1950-1955

Bab ini membahas mengenai kondisi umum Bantaeng pada tahun 1950-1955. Adapun pembahasan dalam bab ini yaitu meliputi kondisi geografis dan kependudukan di Bantaeng, selain itu juga pada bab ini akan dijelaskan mengenai kondisi keamanan Bantaeng di tahun 1950-1952, sampai dengan munculnya gerakan DI/TII di Bantaeng tahun 1953-1955.

#### 2.1 Kondisi Geografis dan Kondisi Kependudukan

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu diantara 23 Kabupaten Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor: 29 tahun 1959 tentang “Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi.<sup>1</sup> Sebelum terbentuknya daerah tingkat II di Sulawesi, Bantaeng (Bonhain) merupakan daerah *Afdeeling* yang secara administratif membawahi empat wilayah-wilayah *Onderafdeling*, meliputi *Onderafdeeling* Selayar, *Onderafdeling* Bulukumba, *Onderafdeliing* Sinjai, dan *Onderafdeeling* Bantaeng itu sendiri. Bantaeng pada mulanya bernama Bantayang nama ini mulai melekat pada tahun 1594 sampai dengan tahun 1737, kemudian pada masa kolonial Belanda “Bantayang” berubah nama menjadi Bonhain. Kemudian pada perkembangan selanjutnya di tahun 1963 dilakukan lagi pergantian nama dari Bonhain menjadi

---

<sup>1</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973), hal. iii.



Bantaeng pergantian nama ini disebabkan karena nama Bonthain sendiri dianggap sebagai ciptaan Belanda.<sup>2</sup>

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak  $\pm 120 \text{ km}^2$  dari arah selatan Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi  $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$  Bujur Timur. Bantaeng dijuluki sebagai daerah 3 dimensi, hal ini disebabkan bagian selatan merupakan daerah pantai, bagian utara merupakan dataran rendah yang sangat cocok untuk pertanian, kemudian di sebelah utaranya yaitu dataran tinggi. Adapun luas wilayah daerah Bantaeng adalah  $395,83 \text{ km}^2$ .

Daerah Bantaeng berbatasan dengan :

1. Di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
2. Di Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
3. Di Sebelah Timur dengan Kabupaten Bulukumba
4. Di sebelah Selatan dengan Laut Flores

Daerah Bantaeng terletak di kaki gunung Lompobattang yang merupakan bekas gunung berapi yang saat ini sudah tidak aktif lagi. Oleh karena itu tanah di Kabupaten Bantaeng merupakan jenis tanah vulkanis. Tanah yang sangat ideal sebagai tanah pertanian. Untuk itu di Kabupaten Bantaeng ditemukan tanaman

---

<sup>2</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Bantaeng (1866-1973)*. No. Reg. 252. Membahas Tentang Rencana Pembagian Wilayah Daerah Sulawesi Selatan Dalam Tujuh Daerah Bawahan Setingkat Kabupaten.

yang bervariasi seperti padi, jagung, ketela, dan kacang-kacangan, yang termasuk tanaman jangka pendek. Selain itu banyak juga ditemukan jenis tanaman jangka panjang yang terdapat di bagian pegunungan yang meliputi tanaman kopi, kemiri, kapok, cengkeh dan Pala.<sup>3</sup> Dengan beberapa budidaya tanaman yang banyak tumbuh di daerah Bantaeng maka tidak mengherankan jika mayoritas masyarakat di Kabupaten Bantaeng bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun.

Mayoritas penduduk di kabupaten Bantaeng adalah kebanyakan suku Makassar, sehingga bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Makassar, dan sebagian lainnya menggunakan bahasa bugis, mereka yang menggunakan bahasa bugis, menepati bagian pantai sebelah timur Bantaeng. Kabupaten Bantaeng yang luasnya hanya 0,605% dari luas seluruh Sulawesi Selatan memiliki penduduk yang cukup Padat. Adapun daftar banyaknya penduduk Bantaeng dari tahun 1952-1955.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Bantaeng tahun 1952-1955**

No	Tahun	Jumlah penduduk
1	1952	57.453
2	1953	57.944
3	1954	57.983
4	1955	62.759

Sumber : Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Reg 469

---

<sup>3</sup> Laporan Pengumpulan Data Peninggalan Sejarah dan Purbakala di Kabupaten Bantaeng. Bantaeng: Pustaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1984, hal. 10.

Dari daftar diatas menunjukkan jumlah penduduk Bantaeng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di tahun 1955 jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 Kondisi Keamanan di Bantaeng tahun 1950-1952**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, jumlah angkatan bersenjata di Indonesia semakin bertambah. Selain tentara regular terdapat pula laskar-laskar perjuangan. Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah dibawah pimpinan Mohammad Hatta mengambil langkah yaitu melaksanakan kebijakan RERA (Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia) pada tahun 1947. Untuk menindaklanjuti kebijakan RERA, Muhammad Hatta kemudian menjalankan 3 hal untuk memobilisasi angkatan perang yang terkena rasionalisasi yaitu melepaskan mereka yang suka rela mau meninggalkan tentara, kedua menyerahkan mereka kepada kementrian pembangunan dan pemuda untuk diberi pekerjaan, dan yang terakhir mengembalikan 100.000 orang ke masyarakat.<sup>4</sup> Seiring dengan keputusan pemerintah untuk mengurangi jumlah anggota tentara, pemerintah juga berusaha mengurangi jumlah kesatuan-kesatuan militer yang ada. Pengurangan divisi menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puasa bagi para laskar, dan angkatan perang yang terkena rasionalisasi. Disisi lain Rera juga dianggap sebagai upaya

---

<sup>4</sup>Abdul Fattah. Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945-2004 dalam Devi Ellok Widaningsih. *Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republic Indonesia di Jawa Tahun 1947-1949*, Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol. 3, No. 3, 2018, hal. 353.

memilah-milah angkatan perang menjadi tentara kelas satu dan tentara kelas kambing, akibatnya sebagian besar pasukan menginginkan posisi di kelas satu yaitu bertugas untuk bertempur. Para komandan kemudian berlomba-lomba menempati posisi tentara nomor satu dengan cara membentuk sebanyak-banyaknya brigade. Hal ini kemudian menimbulkan kondisi yang semakin kacau.

Di Sulawesi Selatan sendiri pada April 1949 letnan Kolonel Kahar mengambil inisiatif melakukan langkah reorganisasi kelaskaran pejuang gerilya. Pada bulan agustus 1949 diadakan konferensi di Maros terbentuklah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS).<sup>5</sup> Dalam konferensi yang diadakan di Maros ini para pembentuk KGSS mengajukan agar KGSS ini kemudian dijadikan divisi Hasanuddin dan Kolonel Kahar sebagai Komandannya. Permintaan ini kemudian tidak diterima oleh komando TT VII/Wirabuana, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota APRIS. Pertentangan inilah yang kemudian menjadi permasalahan gerilya, keamanan bisa terjamin apabila pasukan-pasukan gerilya segera di consolidated dan diresmikan menjadi tentara APRIS.<sup>6</sup>

Untuk mencari jalan penyelesaian masalah tersebut kemudian Kahar meminta kepada pimpinan APRIS agar diizinkan ke Sulawesi yang pada saat tersebut sedang berkejolak. Permintaan ini diterima dan Kahar kemudian

---

<sup>5</sup>Anhar Gonggong. *Abdul Kahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004, hal. 188.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 191.

berangkat ke Sulawesi bersama Letkol Mursito, dan melakukan perjalanan ke beberapa daerah pedalaman untuk menemui para komandan gerilyawan dan anak buahnya.

Pada 24 Juni 1950 Kahar bersama Kolonel Mursito anggota staf Angkatan Darat TNI, Saleh Syahban, dan Mustafa masing-masing koordinator dan Kepala staf KGSS mengadakan perjalanan ke Palombangkeng Takalar dan Bantaeng. Di Takalar beliau mengadakan pertemuan dengan Padjonga Dg Ngalle (Karaeng Palombangkeng) dan Syamsuddin Dg. Ngerang yang keduanya bertindak sebagai pimpinan batalyon Lipan Bajeng. Dalam pertemuan ini kahar meminta supaya pihak gerilya membantu pemerintah dengan jalan mentaati peraturan yang diadakan oleh pemerintah, Kemudian syamsuddin mengatakan bahwa tidak menyetujui cara mereka dimasukkan ke dalam APRIS, mereka meminta semua gerilyawan dimasukan ke dalam APRIS setelah itu baru diadakan tapisan. Setelah itu kemudian Kahar melanjutkan perjalanan ke Bantaeng. Kahar bersama rombongan mengunjungi gerilyawan MBR dan KGSS 02 dibawah pimpinan Arif Rate dan Makmur Amboraga, pembahasannya sama dengan di Takalar akan tetapi penyambutannya lebih hangat. Dalam pertemuan ini Arif rate mengemukakan bahwa ia dan teman-temannya telah berjuang dan berkorban untuk menjalankan perintah Kahar sendiri berangkat dari Jawa ke Sulawesi. Ia minta supaya kahar jangan kembali ke Jawa sebelum ia mempertanggungjawabkan nasib dirinya dan kawan-kawannya. Dari masalah ini dapat disimpulkan bahwa masalah gerilya bukan permasalahan yang muda.

Setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa gerilyawan, yang mana hasilnya tetap sama mereka tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Kemudian setelah itu Kahar melaporkan pertemuannya kepada Kawilarang yang saat itu menjabat sebagai Panglima TT-VII Wirabuana. Laporan Kahar tidak ditanggapi secara positif. Pada tanggal 1 Juli 1950 Kawilarang selaku Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan organisasi lain-lain dibubarkan, dan usaha untuk menghidupkan kembali organisasi gerilya termasuk larangan tentara.<sup>7</sup> Dikeluarkannya dekrit tersebut kemudian menyebabkan Kahar kecewa dan kemudian meletakkan pangkat letkolnya. Kahar kemudian dibawa ke Barakka wilayah Enrekang, oleh seorang pimpinan Gerilya dan disusul 5 Juli semua satuan KGSS menuju hutan.<sup>8</sup> Di daerah Bantaeng sendiri tepatnya 15 Juni 1950 seluruh gerilya (KGSS dan MBR) yang ada di Bantaeng meninggalkan tempatnya masing-masing dan kemudian memilih untuk mengundurkan diri ke hutan dan daerah pegunungan yang ada di Bantaeng.<sup>9</sup>

Pertentangan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada saat itu tidak hanya terjadi antara APRIS/TNI dengan KGSS, tetapi juga antara pasukan KNIL yang

---

<sup>7</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip Saleh Lahade. No. Reg. 122. Mengenai Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS).*

<sup>8</sup> Barbara Sillars Harvey. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII.* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989, hal. 175.

<sup>9</sup> Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Regeering van Oost Indonesie ( Pemerintah Indonesia Timur) tahun 1946-1950. No. Reg. 104. Membahas tentang warta politik Celebes selatan.*

masih berada di Makassar dengan APRIS/TNI maupun para gerilyawan. Pertempuran sengit terjadi pada 15 Mei. Pertempuran ini berlanjut sampai tiga hari dan gencatan senjata disepakati pada 18 Mei.<sup>10</sup> Tidak hanya sampai disitu pada tanggal 5 Agustus pasukan KNIL kembali melakukan penyerangan terhadap Markas besar Brigade Mataram, Satuan Siliwangi dan Komando kota Makassar. ketegangan semakin meningkat ketika Belanda mengirimkan Kapal perusak ke Makassar. pertempuran yang terjadi ini berlangsung sampai pada tanggal 8 Agustus. Pada saat pertempuran terjadi kaum gerilyawan yang pada saat itu berada di hutan kembali ke kota untuk membantu para TNI/APRIS dalam melawan KNIL. Salah satunya adalah Kelompok MBR (Mobile Brigade Ratulangi) pimpinan Arief Rate, mereka berada di pihak APRIS. Akan tetapi kemudian terjadi peristiwa yang tak terduga pada tanggal 5 Agustus terjadi peristiwa penembakan 13 orang pemimpin gerilya dimana Arief beserta petinggi MBR lain dieksekusi mati oleh Abdul Latief, seorang Kapten dari Brigade Mataram yang turut serta dalam rombongan APRIS ke Makassar.<sup>11</sup> Dalam hal ini misi TNI/APRIS memang tercapai. Perlawanan eks KNIL berhasil dipadamkan setelah persetujuan terjadi antara Kolonel Kawilarang dan komisaris Belanda di Makassar Mayor Jendral Scheffelaar, yang mana dalam persetujuan tersebut telah disepakati bahwa KNIL akan meninggalkan Makassar menjelang akhir bulan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip M. Saleh Lahade. No. Reg. 122. Mengenai Laporan khusus Proses Gerilya.*

<sup>12</sup> Harvey, Barbara Sillars. *Pemberontakan... Op. Cit.*, hal. 176.

Akan tetapi disisi lain ketegangan semakin meningkat antara APRIS/TNI dengan gerilyawan setelah terbunuhnya dua pimpinan MBR Arief Rate dan Abbas Bangsawan.

Ketegangan yang semakin meningkat antara APRIS/TNI dan KGSS mendapat perhatian dari berbagai pihak bahkan hal ini menjadi isu politik dalam skala nasional. Permasalahan gerilya menjadi perbincangan dalam sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat di Jakarta. Pada 18 Agustus suatu mosi diajukan oleh DPR (S) (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) Sulawesi Selatan, yang mana meminta agar pemerintah menyelesaikan persoalan status para gerilyawan. Pada 10 Oktober Pemerintah akhirnya menunjuk suatu panitia antar departemen untuk menyelidiki permasalahan gerilya di Sulawesi Selatan yang mana diketuai oleh Mr. Ma'Moen Soemadipradja ia diberi tugas untuk menyelidiki situasi di Sulawesi pada saat itu dan memberi saran penyelesaian. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian pemerintah memutuskan untuk membentuk CTN (Corps Tjadangan Nasional), yang mana dalam pembentukan CTN ini anggotanya akan direkrut dari anggota KGSS. Adapun batalyon-batalyon yang akan dilantik yaitu Bau Massepe, batu putih, Mobile Brigade Ratulangi, Monginsidi dan batalyon 40.000.

Pada tanggal 24 Maret 1951 CTN dilantik di Makassar oleh Letnan Kolonel Kosasih pejabat Panglima TT-VII dengan Letnan Kolonel Kahar sebagai komandannya.<sup>13</sup> Dalam upacara pelantikannya Kahar kemudian keluar dari hutan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal,183.



bersama dengan para anggota KGSS, Setelah pelantikan tersebut kemudian KGSS berganti nama menjadi CTN. Dalam perkembangannya di bulan april-juli tahun 1951 terjadi kekacauan yang disebabkan oleh APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) hal ini kemudian menarik perhatian CTN. Kahar sebagai Komandan CTN menginginkan untuk diberi kepercayaan untuk melakukan operasi pembersihan akan tetapi permintaan ini kemudian ditolak oleh pimpinan APRIS, hal ini kemudian kembali menyebabkan ketegangan antara APRIS dan CTN. Ketegangan semakin bertambah karena Kahar sebagai komando CTN tetap bersikukuh agar CTN diresmikan menjadi anggota APRIS secara utuh dalam satu brigade, yaitu brigade Hasanudddin akan tetapi permintaan ini tidak bisa diterima oleh pihak APRI, oleh karena itu kemudian diadakan rapat pada 17 agustus 1951 yang dipimpin oleh J. F. Warouw yang saat itu menjabat sebagai Komandan Ko. Pas "A" dengan Kahar Muzakkar Komandan CTN Sulawesi Selatan.<sup>14</sup> Dalam rapat ini disepakati beberapa keputusan-keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi dari keputusan tersebut Kahar tetap merasa tidak puas karena keinginannya dari awal tidak terpenuhi oleh karena itu sehari sebelum pelantikan CTN menjadi TNI pada 17 Agustus tahun 1951 Kahar mengumumkan kepada anggota-anggotanya untuk mengundurkan diri dan kembali ke hutan. Setelah peristiwa tersebut akhirnya panglima TT VII Kolonel Kawilarang mengeluarkan perintah operasi (perintah gerakan) untuk membersihkan para pengacau dalam hal ini yaitu Kahar dan anggota-anggotanya yang dianggap menyinggung kehormatan Negara.

---

<sup>14</sup> Anhar Gonggong. *Abdul... Op. Cit.*, hal, 302.

Setelah CTN tidak jadi dilantik dan meninggalkan rayonnya beberapa kekacauan kemudian terjadi di Bantaeng. Dari laporan tahunan tahun 1951 kekacauan yang terjadi di Bantaeng berupa tindakan kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan. Diduga bahwa ex CTN merupakan biang keladi dari tindakan kriminalitas yang dilakukan terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Dari kekacauannya yang terjadi menyebabkan perekonomian masyarakat tidak begitu stabil bahkan cenderung mengalami penurunan. Para pekebun dan petani banyak yang meninggalkan lahan garapannya, menyebabkan lahan garapan tersebut tidak terjaga dan terawat dengan baik. Selain itu para petani dan pekebun yang telah memanen hasil garapannya juga takut membawa hasil garapannya ke pasar karena jaraknya yang cukup jauh akibatnya keadaan tersebut membuat beberapa keperluan sehari-hari menjadi meningkat harganya. Di sisi lain kekacauan yang terjadi juga menyebabkan aktivitas pendidikan terganggu banyak murid yang tidak mengunjungi sekolahnya dan banyak guru-guru yang mengungsi ke kota, bahkan Sekolah-sekolah di kota juga berkurang karena beberapa dipakai oleh tentara untuk menampung pengungsi yang ada dikota dan untuk mencukupi gedung-gedung yang diperlukan, maka pemerintah membuat gedung darurat.

Pada bulan Januari tahun 1952, Gerombolan melakukan infiltrasi atau penyusupan di daerah Bantaeng, gerombolan ini diketahui berasal dari Jeneponto. Pengacau atau gerombolan ini kadang muncul di daerah perbatasan jeneponto dan Bantaeng. Salah satu daerah di Bantaeng yang juga kerap kali menjadi daerah yg sering didatangi oleh gerombolan adalah daerah Loka, dimana kadang muncul

gerombolan bersenjata api yang jumlahnya bisa dikatakan tidak sedikit.<sup>15</sup> Meskipun beberapa gerombolan bermunculan di daerah Bantaeng khususnya perbatasan Bantaeng-Jeneponto dan daerah Loka akan tetapi mereka tidak mampu melebarkan sayapnya di beberapa daerah lain di Bantaeng hal ini disebabkan para pengacau mendapat tekanan dari pihak tentara dan polisi setempat.

Pada tanggal 25 Mei 1952 Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh gerombolan di Bantaeng, maka dibentuk Bn. Arief Rate yang dipimpin oleh Andi Singke yang kemudian dilantik menjadi bn 722. Selanjutnya pada bulan September 1952 mulai dilakukan operasi oleh bn 722 di Bantaeng terhadap gerombolan kahar Muzakkar yang dipimpin oleh anak buah Kahar Muzakkar H. Mappiase<sup>16</sup>

Di akhir bulan Desember tahun 1952, gangguan keamanan yang terjadi di daerah Bantaeng membuat masyarakat menjadi semakin meningkat, hal tersebut disebabkan telah terjadi beberapa kali tembak menembak pada pos tentara di dekat kota Bantaeng. Pada saat terakhir tahun 1952 tersebut diketahui telah terjadi penembakan terhadap dua orang guru di kampung Dampang (Gantarang keke) dan seorang lagi penduduk kampung Mamapang (Kolasa) Bantaeng.

---

<sup>15</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Inventaris Arsip (Rahasia) Provinsi Sulawesi 1946-1960*, No. Reg. 235. Mengenai Laporan/Warta Politik Tahun 1952-1957 dari Daerah Bantaeng.

<sup>16</sup> *Ibid.*

### 2.3 Aktivitas DI/TII di Bantaeng Tahun 1953-1955

Kegagalan-kegagalan yang telah ditempuh Kahar Muzakkar Pada periode tahun 1950-1953, yang menuntut untuk menjadi anggota APRIS. Membuatnya kemudian mencari alternatif lain yaitu bergabung dengan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat.<sup>17</sup> Pada tanggal 7 Agustus 1953 Abdul Kahar Muzakkar menyatakan dirinya sebagai bagian dari gerakan Ini. Penggabungan Kahar Muzakkar menandai perubahan yang besar dalam gerakannya. Sebelum bergabung ideologi gerakannya adalah pancasila, setelah itu beralih menjadi ide negara islam. Adapun tujuan dari keputusan yang dipilih Kahar Muzakkar ini yaitu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat di Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>18</sup>

Di Sulawesi Selatan Abdul Kahar Muzakkar kemudian suatu distrik-distrik militer yang masing-masing dikepalai oleh seorang Komandan Brigade yakni sebagai berikut:

1. Brigade Latimojong, Komandan Hamid Ali dan Usman Balo dengan wilayah operasi Pare-pare dan Enrekang.
2. Brigade Batu Putih, Komandan Andi Tenriadjeng dengan wilayah operasi Palopo dan Siwa.
3. Brigade Lereng Cinta, Komandan Bahar Mattaliu dengan wilayah operasi Soppeng.

---

<sup>17</sup> Anhar Gonggong. *Abdul... Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal, 245.

4. Brigade Rante Mario, Komandan Sanusi Daris dengan wilayah operasi Enrekang.
5. Brigade 40.000, Komandan Syamsul Bachri dengan wilayah operasi Wajo.<sup>19</sup>

Brigade Lereng Cinta dengan Komandan Mataliu dengan wilayah operasi Soppeng kemudian melebarkan wilayah Operasinya ke Bantaeng. Pada tanggal 13 Oktober Brigade Lereng Cinta yang dipimpin oleh Alie A.T, masuk ke wilayah Bantaeng. Kemudian di Bantaeng dibentuk pasukan yang disebut C.P III.<sup>20</sup> Adapun wilayah aksi dari CP III selain dari Bantaeng adalah Sinjai, Bulukumba dan Selayar. Di Bantaeng pasukan CP III banyak berkeliaran di daerah pegunungan.

Selain berkeliaran di pegunungan gerombolan yang ada di Bantaeng juga biasanya melakukan aksinya di kota-kota. Beberapa perusakan-perusakan dilakukan oleh gerombolan misalnya saja melakukan perusakan-perusakan di jalan, baik itu berupa pembongkaran jembatan dan penebangan pohon-pohon di pinggir jalan, hal ini dilakukan untuk mengacaukan aktivitas lalu lintas di Bantaeng. Pada 7 Agustus sampai 10 Agustus tahun 1954 gerombolan melakukan

---

<sup>19</sup> Mohammad Natsir. *Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Massenrempulu; Studi Tentang Integrasi Gerilya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2004, hal. 100-101.

<sup>20</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960, Vol. I No. Reg. 333*. Mengenai Gerombolan DI/TII di Sulawesi Selatan.

aksi pembongkaran jembatan antara Bantaeng-Bulukumba. Serta penebangan pohon-pohon kayu dipinggir jalan ke Banyorang sangat diaktifkan. Selain mengacaukan aktivitas lalu lintas para gerombolan juga banyak melakukan pembakaran terhadap sekolah-sekolah yang ada di Bantaeng, seperti yang terjadi pada dua buah sekolah rakyat yaitu Pullauweng, dan Pasorongi yang jaraknya 4 km dari kota Bantaeng yang dibakar oleh para gerombolan. Dalam melakukan perusakan biasanya anggota angkatan perang dibantu masyarakat melakukan perbaikan, meskipun setelah diperbaiki para gerombolan kemudian melakukan perusakan/pembongkaran kembali bahkan sampai 2 atau 3 kali.<sup>21</sup>

Pada tahun 1954, berdasarkan laporan-laporan dari beberapa kepala kampung yang ada di Bantaeng terjadi beberapa pengambilan berkas-berkas pribadi masyarakat oleh gerombolan, baik itu berupa surat pajaknya/ surat jiwa, kartu penduduk, pada saat mereka melakukan perjalanan. Seperti halnya yang terjadi di Kampung Tinompa, seorang warganya dicegat pada tanggal 19 september 1954 di Kilometer 117/118, seorang warga di Kampung Katapang juga dicegat pada 18 September 1954 di Banyorang dan Pullauweng, juga warga kampung Bissampole pada 18 September 1954 dibagian dicegat dan diambil berkas-berkas pribadinya di Batupake-Bissampole.<sup>22</sup>

Pada 12 Juni 1955, Djumalla, seorang warga Bissampole, Bantaeng diculik oleh gerombolan di kampung Bissampole sewaktu ia mengerjakan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

sawahnya. Dalam penculikan ini menurut laporan pihak gerombolan menggunakan senjata sten, dan pistol dan mereka berjumlah dua orang saja.<sup>23</sup>

Selain melakukan perusakan-perusakan gerombolan DI/TII juga biasanya memungut pajak terhadap masyarakat, tiap rumah dikenai pajak oleh gerombolan DI/TII. Rumah-rumah yang agak baik dikenakan pajak sebesar Rp. 70 sampai Rp. 100 per-bangunan, rumah-rumah yang beratap seng atau genteng dikenakan pajak sebesar Rp. 150, dan rumah-rumah yang mempunyai perkakas/perabotan yang bagus dan rapi dikenakan pajak sebesar 300.<sup>24</sup>

Tidak sampai disitu saja di tahun 1955 anggota DI/TII juga mencoba menggagalkan pemilu. Pasukan DI/TII memberi seruan yang mengancam akan menembak di tempat masyarakat yang ikut serta dalam pemilu. Selain itu anggota DI/TII juga melakukan penyerangan di tempat pemungutan suara (TPS). Seperti yang terjadi di tanggal 14 Desember 1955, TPS yang ada di Dampang dan Gantarang Bantaeng diserang oleh 50 orang anggota gerombolan dengan membawa 20 pucuk senjata api. Serangan yang dilakukan oleh gerombolan tersebut menyebabkan meninggalnya dua anggota polisi La Haling dan Elang, seorang anggota TPS Muhammad Yusuf. Selain itu ada juga dua anggota polisi yang di bawa pergi yaitu Mading dan Achmad, satu orang anggota TPS yaitu Abdul Aziz. Dari penyerangan ini anggota DI/TII juga berhasil mencuri beberapa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960, Vol I. No. Reg. 356.* Mengenai Statistik Kejahatan di Bantaeng tahun 1954-1956.

alat-alat pemilihan umum, dan merusak dua buah kotak suara. Adapun alat-alat pemilihan umum yang hilang yaitu surat suara, daftar kutipan pemilih, dan dokumen Negara<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Arsip Propinsi Sulawesi 1950-1960, Vol. No. Reg. 277*. Mengenai Laporan dan Ikhtisar Keamanan di Bantaeng tahun 1950-1960.